



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAHARUDIN
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 706060

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.220.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 369 m2/100 m2 di KAB / KOTA DOMPU, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 92.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA FIT X Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 73.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 32.193.731

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	1.417.793.731
III. HUTANG	Rp.	588.077.733
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	829.715.998

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.